
Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)

www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id

**Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Pada
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
Kecamatan Sengah Temila**

Yessi Wilda, Reni Dwi Widyastuti, Rina Mayasafitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Bhakti, Pontianak

E-mail : yessiwilda03@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of accountability and transparency in budget management at the Agricultural Extension Center. The problem that occurs is the delay in submitting accountability reports (SPJ) which impacts the next budget submission. This study aims to analyze the financial accountability system at the BPP of Sengah Temila District, as well as identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The method used is descriptive qualitative through observation, interviews and documentation studies. The results of the study indicate that the financial accountability system is in accordance with the rules, starting from management to reporting of Financial Accountability. Supporting factors include the number of human resources, the existence of activity plans and budgets, the existence of disbursement reports and a good relationship between the BPP of Sengah Temila District and the Department of Agriculture, Fisheries and Food Security of Landak Regency. While inhibiting factors include the majority of human resources majoring in agriculture and no accounting majors, limited infrastructure, unstable internet, delays in budget receipts to the BPP account.

Keywords: *Financial Accountability, Agricultural Extension Center, accountability, transparency*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pada Balai Penyuluhan Pertanian. Permasalahan yang terjadi adalah keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang berdampak pada pengajuan anggaran berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban keuangan pada BPP Kecamatan Sengah Temila, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan sudah sesuai aturan, dimulai dari pengelolaan hingga pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan. Faktor pendukung meliputi banyaknya SDM, Adanya rencana kegiatan dan anggaran, adanya laporan pencairan dana dan hubungan yang baik antara BPP Kecamatan Sengah Temila dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Sedangkan faktor penghambat yaitu SDM kebanyakan adalah jurusan pertanian dan tidak ada jurusan akuntansi, sarana prasarana yang terbatas, internet tidak stabil, keterlambatan pada saat penerimaan anggaran ke rekening BPP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Keuangan, Balai Penyuluhan Pertanian, akuntabilitas, transparansi

PENDAHULUAN

Usaha sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, peningkatan pengetahuan sektor pertanian diperlukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global yang berperan penting dalam melaksanakan program pembangunan pertanian (Rohmah et al., 2025). Adanya dana atau anggaran akan sangat mempermudah setiap program yang telah dirancang, baik dalam perjalanan dinas maupun administratif lainnya dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi di lapangan nantinya, karena hal ini bertujuan untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan sumberdaya manusia untuk menunjang kebutuhan terutama pada sektor pertanian bidang

pemerintahan maupun non instansi pemerintahan atau yang disebut juga warga sipil. Dalam kegiatan usaha pertanian, petani bisa melakukan kegiatan ekonomi lainnya yang masih terkait dengan sektor pertanian. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bidang pertanian guna mencapai target pertumbuhan, peningkatan produk dan produktivitas dalam rangka mensukseskan pembangunan dibidang pertanian (Widyastuti et al., 2023).

Penyuluhan sangat penting untuk mengetahui dan memberi edukasi dimasyarakat terutama sektor petani, pekebun dan peternak (Husna, 2024). Adanya penyuluhan dilapangan, tentu akan memberi dampak pada warga sipil petani terkhususnya, dengan demikian instansi yang akan terjun langsung di lapangan juga akan mengetahui apa saja yang menjadi keluhan petani mulai dari anggarannya maupun sistem pengajuan apa yang selama ini menjadi permasalahannya dalam sektor pertanian. Balai penyuluhan pertanian bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi, pelatihan, dan bantuan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani (Fitriani, 2024). Balai penyuluhan pertanian kecamatan memiliki peran yang strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan (Khoirunisa, 2024). Balai Penyuluhan Pertanian berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik (Fadilah et al., 2023). Adanya anggaran yang terstruktur dan dikelola dengan baik, supaya anggaran yang dikeluarkan tidak semata-mata untuk satu tujuan saja, melainkan dapat menjadi substansi yang bisa dikelola sebagaimana mestinya oleh pihak Balai Penyuluhan Pertanian (Afif, 2021). Karena setiap anggaran yang dikeluarkan akan sangat berdampak pada Pertanggungjawaban keuangan nantinya.

Secara umum tugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yaitu melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan, maka Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) semestinya dituntut secara aktif dan inovatif untuk melaksanakan penyuluhan demi pembangunan sumber daya manusia pertanian dan lahan garapan pertanian yang berhasil (Rambet et al., 2023). Balai Penyuluhan Pertanian menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) atau Balai Penyuluhan Kecamatan. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sengah Temila berdiri pada 10 juni 1982. Dimana komoditas unggulan tanaman pangan seperti tanaman padi dan palawija, selain tanaman pangan ada juga tanaman perkebunan seperti tanaman karet dan kelapa sawit. Kedua sektor inilah yang menjadi komoditas unggulan di wilayah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila.

Berdasarkan wawancara, pihak pertanggungjawaban keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan sengah temila tidak pernah tepat waktu, hal ini disebabkan karena terjadinya penerimaan dana atau biaya masuk ke rekening Balai Penyuluhan Pertanian sering terlambat, sehingga Pertanggungjawaban keuangan akan mengalami keterlambatan terutama di bagian Pertanggungjawaban Keuangan yang bersangkutan. Keterlambatan terjadi karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belum selesai dibuat oleh bendahara Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila yang akan diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Landak. Adapun dampak dari keterlambatan pertanggungjawaban keuangan ini dapat mengalami kesulitan untuk mengajukan suatu anggaran selanjutnya yang akan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Landak. Berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh penulis terkait penelitian yang dilakukan bahwa adanya sanksi atas keterlambatan yaitu tindakan yang diambil biasanya hanya berupa teguran atau peringatan secara lisan oleh Kepala Dinas Pertanian.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban adalah dokumen tertulis yang disusun untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau setara. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi atas seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa mendatang. Menurut (Losung & Wokas, 2024) menyatakan bahwa, “Pertanggungjawaban merupakan sistem penyampaian informasi berisi penjelasan data keuangan berdasarkan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi serta kategori perolehan dan beban yang bisa diatur pihak manajemen”.

Tujuan Pertanggungjawaban Keuangan

Tujuan pertanggungjawaban keuangan adalah hal yang utama dari proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Tujuan ini mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data keuangan (Afif et al., 2025). Pertanggungjawaban Keuangan ditujukan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku. Hal ini juga membantu mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap institusi atau organisasi yang bersangkutan.

Manfaat Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh suatu instansi memiliki manfaat terutama bagi instansi yang memerlukan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dimiliki. Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban yang berupa informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran (Jusmani & Mursalin, 2020). Dengan adanya laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik, semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bagaimana dana digunakan dan dikelola dengan baik serta mencegah spekulasi negatif dan meningkatkan kepercayaan publik atau pemangku kepentingan.

Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.07/2020 Pasal 6 Ayat (7) bahwa Batas Waktu Penyampaian Laporan Pemerintah Daerah Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (4) Huruf d Paling Lambat Tanggal 14 Bulan Pertama Triwulan Berikutnya. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau Balai Penyuluhan Kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah.

Prosedur Pelaporan Pertanggungjawaban

Prosedur Pelaporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara meliputi beberapa tahapan. Adapun tahapan dalam pelaporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bukti transaksi
2. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti transaksi biaya kegiatan
3. Memeriksa kesesuaian bukti transaksi
4. Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diperiksa dan di tandatangani oleh Kepala Instansi sebelum di serahkan ke Bendahara Dinas Pertanian
6. Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Kepada Bendahara Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

Bendahara Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak merima laporan pertanggungjawaban (SPJ).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini penulis menerapkan melalui beberapa cara dengan menggunakan Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi untuk melengkapi serta sebagai acuan dalam penulisan Skripsi ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data ini dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau lokasi di mana objek penelitian dilakukan. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan terkait topik penelitian sebagai data primer. Informan yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti adalah Bendahara Keuangan dan Penyuluh Lapangan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagan Alir (Flowchart) dan wawancara mendalam (Indepth interview).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Pertanggungjawaban Keuangan pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila

Analisis Sistem Pertanggungjawaban Keuangan pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila yang dilakukan oleh peneliti meliputi: pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber atau informan, yaitu Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dan Bendahara Balai Penyuluhan Pertanian.

Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya untuk pengelolaan keuangan ini sudah sesuai dengan peraturan yang dilakukan dimana digunakan untuk menunjang kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian. Adapun penggunaan anggarannya digunakan semestinya sesuai dengan permohonan dan rencana anggaran yang telah dibuat yaitu, pengadaan sarana dan prasarana, konsumsi kegiatan baik sesama anggota Balai Penyuluhan Pertanian atau dengan kelompok tani, maupun biaya operasional yang telah dilakukan. Pengelolaan keuangan ini juga dilakukan transparan sehingga setiap anggota mengetahui mengenai pemasukan dan pengeluaran dari anggaran yang diterima oleh Balai Penyuluhan Pertanian. Setiap kegiatan yang dilakukan juga terdapat suatu laporan yang dibuat dan kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban dari semua akomodasi pengeluaran oleh bendahara Balai Penyuluhan Pertanian. Setelah itu dilaporkan lagi kepada Dinas. Serta dalam pengelolaan keuangan ini juga adanya mufakat dimana setiap anggota ikut serta berkompromi dan mufakat mengenai kegiatan dan pengelolaan dana yang baik yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan anggaran yang diberikan.

Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan ini sangat berperan penting karena untuk melihat pembuktian dan pertanggungjawaban dari setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah tercatat yang berguna dalam keberhasilan suatu pekerjaan. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat oleh bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang/surat berharga sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Wijaya, 2022). Dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan ini dibuat oleh Bendahara Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila yang diawasi oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dalam penyusunan dan kesesuaian dan ketepatan pembuatan laporannya. Berdasarkan peraturan mengenai masa penyelesaian dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Pada pertanggungjawaban yang telah dilaporkan oleh bendahara Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila tidak tepat sesuai dengan peraturan atau

tanggal yang ditentukan sehingga mengalami keterlambatan 1 sampai 2 minggu. Dampak dari keterlambatan pertanggungjawaban keuangan ini dapat mengalami kesulitan untuk mengajukan anggaran selanjutnya yang akan di periksa oleh Inspektorat Kabupaten Landak.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pertanggungjawaban Keuangan Pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila

Analisis faktor-faktor yang dilakukan peneliti yaitu dengan mencari faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban keuangan pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila dengan melakukan survei lapangan dan melakukan wawancara yang sudah terstruktur dengan narasumber atau informan. Pada penelitian di lakukan wawancara untuk memperkuat bukti pendukung permasalahan yang sudah dijelaskan pada bab bab sebelumnya.

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yang dimana yang menjadi Narasumber atau informan dalam penelitian ini yaitu, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dan Bendahara Balai Penyuluhan Pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa, dalam surat pertanggungjawaban keuangan ini mengalami beberapa kendala baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi yang lainnya sehingga ini menjadi faktor penghambat sehingga terjadinya suatu keterlambatan dalam pelaporan ke Dinas dan ini juga menjadi suatu penghambat untuk proses pencairan anggaran ditahap selanjutnya.

Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung dalam pertanggungjawaban keuangan diantaranya sebagai berikut: Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Balai Penyuluhan Pertanian terbilang banyak, Adanya rencana kegiatan dan anggaran, Adanya laporan pencairan dana, laporan kegiatan Penyuluhan dan Laporan Pertanggungjawaban yang diberikan dari Balai Penyuluhan Pertanian kepada Dinas Pertanian, Adanya hubungan yang baik antara Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat dalam pertanggungjawaban keuangan pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila adalah sebagai berikut: Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila kebanyakan adalah jurusan Pertanian dan tidak ada jurusan Akuntansi, Sarana prasarana yang terbatas dan kurang memadai seperti komputer atau laptop khusus untuk bendahara Balai Penyuluhan Pertanian sehingga menggunakan laptop pribadi, Bendahara tugasnya bukan hanya satu sebagai bendahara saja tetapi juga tugas pokok nya sebagai penyuluh atau petugas lapangan. Sehingga membuat banyaknya pekerjaan yang dikerjakan, Jaringan internet tidak stabil sehingga menjadi penyebab terhambatnya kegiatan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan serta pengiriman laporan pertanggungjawaban keuangan yang akan di serahkan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, Sulitnya komunikasi dan koordinasi dikarenakan kurangnya akses internet atau telepon yang baik dapat menghambat komunikasi dengan instansi terkait, atau bahkan antar bagian di Balai Penyuluhan Pertanian, Terdapat keterlambatan pada saat penerimaan anggaran ke rekening Balai Penyuluhan Pertanian sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara keuangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pertanggungjawaban Keuangan pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila melalui beberapa tahap yaitu, pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan anggaran ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan berfungsi untuk menunjang kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila. Faktor pendukung dan penghambat pertanggungjawaban keuangan pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila. Faktor pendukung dalam pertanggungjawaban keuangan ini yang pertama, banyaknya sumber daya manusia (SDM). Kedua, adanya rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran. Ketiga, adanya laporan pencairan anggaran. Keempat, adanya hubungan yang baik antara Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Faktor penghambat yang pertama, sebagian besar pegawai yang menangani pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan memiliki pendidikan S1 bidang pertanian, semestinya memiliki bidang keahlian keuangan. Kedua, sarana dan prasarana seperti komputer masih terbatas. Ketiga, petugas bendahara merangkap sebagai penyuluh atau petugas lapangan. Keempat, jaringan internet yang tidak stabil. Kelima, terdapat keterlambatan pada saat pencairan anggaran ke rekening Balai Penyuluhan Pertanian sehingga menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan yang sudah di rencanakan dan menyebabkan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Saran bagi Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dan Bendahara Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, keakuratan, dan ketepatan waktu, bagi bendahara dapat meningkatkan komunikasi, menempatkan petugas khusus yang menangani sebagai bendahara. Bagi Pemerintah Daerah atau Lembaga Terkait: memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Bendahara Keuangan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Melakukan monitoring langsung ke Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sengah Temila, dapat dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Penelitian selanjutnya di sarankan untuk memperluas objek penelitian sehingga hasil yang di peroleh lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Cv. Syakir Media Press.
- Afif, A. (2021). Implementasi Pengelolaan Keuangan Pelaku UMKM Berdasarkan SAK-EMKM. *Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI)*, 1(2), 24–35.
- Afif, A., Jaurino, J., & Mayasafitri, R. (2025). Peran Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal dalam Keberlanjutan UMKM Kabupaten Kubu Raya. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(7), 2984–2992. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i7.9195>
- Bajamal, J. A., Darman, D., Nofal, M., & Bidin, C. R. K. (2025). Peran Sosialisasi Pengelolaan Dana Dalam Meningkatkan Realisasi Anggaran: Indonesia. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(1), 491–506.
- Basna, N., Bharanti, B. E., & Waromi, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(2), 217580.

- Fadilah, H., Lubis, A. W., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 28–40.
- Fitriani, I. F. (2024). Penguatan Kapasitas Petani Melalui Penyuluhan Studi Pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Fitriyah, Y. A., & Siregar, H. O. (2021). Analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap perilaku biaya pada perusahaan start up. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 182–186.
- Gami, E. R. P., & Aisyah, S. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Pegawai Kantor Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8).
- Husna, I. M. (2024). Peran Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kab. Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam. *IAIN PONOROGO*.
- Ida, R. (2018). Etnografi virtual sebagai teknik pengumpulan data dan metode penelitian. *The Journal of Society and Media*, 2(2), 130–145.
- Jusmani, J., & Mursalin, M. (2020). Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Pengendalian Biaya Administrasi dan Umum. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(1), 43–54.
- Khoirunisa, A. (2024). Peran Balai Penyuluhan Pertanian (Bpp) Dalam Memberdayakan Ekonomi Kelompok Tani Sugih Tani Ii Melalui Usaha Bunga Potong Di Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. *Falkutas Dakwah Dan Komunikasi*.
- Kristiawati, E. (2018). Analisis Penerapan Sipkd Terhadap Kinerja Bendahara Pada SKPD-SKPD Di Kota Pontianak. *Jurnal Equilibrium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti*, 1(1), 26–41.
- Lahidjun, N. M. R., Rauf, A., & Saleh, Y. (2020). Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian pada Petani Hortikultura di kecamatan Limboto. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5(1), 45–54.
- Losung, D. H., & Wokas, H. R. N. (2024). Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Molompar Atas Kecamatan Tombatu Timur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 12(03), 977–986.
- Moeller, R. R. (2007). *COSO enterprise risk management: understanding the new integrated ERM framework*. John Wiley & Sons.
- Mulyadi. (2020). *Akuntansi Manajemen*. Salemba Empat.
- Patutie, R., & Murniati, S. (2023). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang. *Accounting Journal of Ibrahimy (AJI)*, 1(1), 23–30.

- Peraturan Menteri Keuangan. (2020). Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Menimbang Laporan Data Bulanan, Dan Laporan Pemerintah Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id Lainnya. Kementerian Keuangan.
- POLII, D. J. C. Q., & Taroreh, F. J. H. (2023). Prosedur Penjualan Unit Dan Penerimaan Kas Pada Pt Wahana Wirawan Manado. Universitas Katolik De La Salle Manado.
- Qibtiyah, M. (2023). Analisis Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
- Rambet, J. E. S., Pangemanan, F. N., & Undap, G. (2023). Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Tanaman Hortikultura Di Kecamatan Motoling Timur. *Governance*, 3(1).
- Rastina, R. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajemen Kurir dan Logistik Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Parepare. IAIN Parepare.
- Reny, S. P., & MP, C. M. A. (2022). Komunikasi & Penyuluhan Pertanian. Cv. Azka Pustaka.
- Risal, R., Jaurino, J., Kristiawati, E. K., Sartono, S., & Wulandari, R. (2022). Fenomena Kecurangan Pemesanan Pada Jasa Transportasi Online Dalam Perspektif Fraud Triangle. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 5(2), 65–78.
- Rohmah, J., Jannah, W., Aryawati, N. U., & Wahyunintyas, S. P. (2025). Peran Pembangunan Ekonomi dalam Membentuk Sumber Daya Manusia yang Unggul di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(3), 70–87.
- Sasongko, P., & Wijayati, D. (2014). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perhotelan dan Restoran di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 106–113.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Thalib, M. A. (2022). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 44–50.
- Widyastuti, R. D., Sari, W., Yahya, R. F., & Mayasafitri, R. (2023). Membentuk Unit Bisnis Dalam Komunitas Wirausaha Muda Bidang Pertanian di Kota Pontianak. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 2357–2362.
- Wijaya, F. M. (2022). Analisis pelaksanaan sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara di kantor kecamatan tombariri kabupaten minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1328–1336.